



RAPAT KOORDINASI

**PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI**

Senin, 27 Oktober 2025

**TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025**

UNDANGAN RADIOGRAM



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI : MENTERI DALAM NEGERI			
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA			
TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI			

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA

Nomor : 500.2.3/7640/SJ

DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN ARAHAN MENTERI KOPERASI MENGENAI KOPERASI DESA GARING KELURAHAN MERAH PUTIH KMA EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH KMA PEMBUKAAN RAKOR DALAM RANGKA SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN GARING LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 27 OKTOBER 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI JABATAN NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA

BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 KMA ARAHAN MENTERI KOPERASI MENGENAI KOPERASI DESA GARING KELURAHAN MERAH PUTIH KMA EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH DAN PEMBUKAAN RAKOR DALAM RANGKA SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN GARING LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH TTK KMA

CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA

SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA PROV KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KA BAPPEDA PROV KMA KA BAPENDA PROV KMA KA BPKAD PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KOPERASI KMA PERUMAHAN KMA PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM DAN STATISTIK TTK KMA

DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE DAN TIDAK DIWAKILKAN BERSAMA FORKOPIMDA KAB GARING KOTA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KAB GARING KOTA KMA KA BAPENDA KAB GARING KOTA KMA KA BPKAD KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN KOPERASI KMA PERUMAHAN KMA PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM DAN STATISTIK TTK KMA

TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA

EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA

LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI DRESS CODE PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA

DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA

EEE TTK DUM TTK HBS

TANGGAL PEMBUATAN 25 Oktober 2025

Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal <u>Tomsy Tohir</u>		Terima	Kirim		
Tanda Tangan					



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inflasi via Zoom

Hari/Tanggal : Senin / 27 Okt 2025

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	SPi LILIANA	Asisten 2	P	1
2	Fadilurrahman A.	Kabag Eko SDA		2
3	Eddy Rahmawati	BPS		3
4	Eddy Sabar	Disnre	L	
5	Deby Vhango	BPRD	L	5
6	Diaj yudhan A	Bag. Ekosda		6
7	Ruevori	DUP3		7
8	Seibhan Noor	Inspektorat	L	8
9	Eko	Polkes R/P		9
10	HTRYADI	DSDAS Pr.	L	10
11	ARIPAH	Disperhim	L	11
12	Noor Effendi	BAPPERLOA	L	12
13	Hendra	DISKOP	L	13
14	Hakim	UPT. Bauntung	L	14
15	L INDIRA	Eko dan SDA	L	15
16	Mina	Eko L SDA		16
17	P. P. AX.	BPRD		17
18	Stetang.	"		18
19	Eko Pur Anni	Eko SDA	P	19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/7640/SJ Tanggal 25 Oktober 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta : 1. Menteri Dalam Negeri
2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : **Senin, 27 Oktober 2025** pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula BPKAD Kota Banjarbaru
- V. Hasil : **1. BADAN PANGAN NASIONAL**
- a) Kondisi pangan nasional tahun 2025 secara umum masih dalam situasi terkendali meskipun terdapat beberapa komoditas dengan tantangan harga dan ketersediaan. Proyeksi neraca pangan menunjukkan ketersediaan untuk komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai besar relatif mencukupi hingga akhir tahun. Namun, sebagian komoditas seperti cabai rawit dan daging sapi masih memerlukan tambahan pasokan impor untuk menjaga stabilitas stok dan harga di pasar domestik.
 - b) Dalam aspek harga, Bapanas mencatat adanya disparitas antara harga eceran tertinggi (HET) dan harga pasar, terutama untuk komoditas beras premium dan medium di sejumlah provinsi, dengan Papua Tengah, Papua Barat, dan Maluku menjadi daerah dengan selisih harga tertinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Satgas Pengendalian Harga Beras yang melibatkan POLRI, BULOG, dan kementerian terkait melaksanakan pengawasan ketat terhadap penerapan HET serta penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi antarwilayah, serta penguatan cadangan pangan daerah.
 - c) Selain itu, Bapanas bersama BULOG telah merealisasikan penyaluran beras SPHP sebanyak 542 ribu ton hingga Oktober 2025, terutama di wilayah Jawa dan DKI Jakarta, serta menyalurkan bantuan pangan bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan. Penyaluran SPHP jagung juga mencapai 18.181 ton, mendukung stabilitas pasokan untuk sektor peternakan. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan, menekan inflasi pangan, serta mewujudkan kesejahteraan petani, pedagang, dan masyarakat secara berimbang.
- 2. BADAN PUSAT STATISTIK**
- a) Perkembangan inflasi nasional masih dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas cabai merah dan daging ayam ras yang sejak September 2025 memberikan andil signifikan terhadap kenaikan harga. Dari hasil pencatatan SP2KP hingga 24 Oktober 2025, sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 23 provinsi lainnya mengalami penurunan. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH antara lain cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras, yang turut berperan dalam tekanan inflasi pada beberapa wilayah di Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Dari sisi spasial, beberapa kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi di Sumatera antara lain Tapanuli Selatan, Tanjung Balai, dan Sungai Penuh, sedangkan di Jawa meliputi Blora, Kediri, dan Pekalongan. Di luar Jawa-Sumatera, wilayah seperti Mamberamo Raya dan Malaka juga mencatat peningkatan harga akibat melonjaknya harga daging ayam ras dan minyak goreng. Sementara itu, sejumlah daerah seperti Tapin (Kalimantan Selatan) dan Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara) justru mengalami penurunan IPH cukup signifikan. Temuan ini menunjukkan adanya variasi tekanan harga antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas pangan.
- c) Secara komoditas, harga beras medium dan premium hingga M4 Oktober 2025 tercatat menurun masing-masing sebesar 1,65% dan 0,69% dibanding bulan sebelumnya. Sebaliknya, cabai merah naik 6,10% dan telur ayam ras meningkat 2,24%, sementara cabai rawit dan bawang merah mengalami penurunan harga masing-masing 5,03% dan 7,90%. Dengan demikian, meskipun sebagian besar harga pangan menunjukkan tren stabil bahkan menurun, beberapa komoditas strategis seperti cabai merah dan telur ayam ras tetap menjadi fokus pengendalian karena berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi menjelang akhir tahun 2025.
- d) Pada minggu ke-4 Oktober 2025, **Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Banjarbaru** mencatat deflasi sebesar -0,25. Penurunan harga tersebut dipengaruhi terutama oleh komoditas:
 - Bawang Merah (-0,2115)
 - Beras (-0,7813)
 - Cabai Merah (-0,2564)

Deflasi sebesar -0,25 yang tercatat pada minggu ke-4 Oktober 2025 di Kota Banjarbaru menunjukkan adanya penurunan harga pada beberapa komoditas utama, terutama beras, bawang merah, dan cabai merah, yang masing-masing memberikan andil signifikan terhadap penurunan indeks harga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasokan pangan di daerah dalam keadaan cukup melimpah, kemungkinan akibat panen di sejumlah wilayah produsen, serta menurunnya permintaan masyarakat setelah periode konsumsi tinggi sebelumnya. Meskipun berdampak positif terhadap stabilitas harga dan pengendalian inflasi, tren deflasi ini tetap perlu diantisipasi agar tidak menekan pendapatan petani dan pelaku usaha pangan lokal.

3. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Kejaksaan menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kepastian hukum, akuntabilitas keuangan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan. Melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi dengan memberikan pendampingan hukum terhadap berbagai program strategis pemerintah, seperti Program Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, serta sinkronisasi program dan kegiatan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- b) Selain itu, Kejaksaan juga aktif terlibat dalam kegiatan nyata di lapangan seperti Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga komoditas pangan pokok, serta gerakan menanam dan panen komoditas strategis seperti jagung, cabai, padi, dan bawang merah di berbagai daerah. Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat daerah. Sebagai tindak lanjut, Jamdatun merekomendasikan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat,

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

daerah, dan aparat penegak hukum; pelibatan Kejaksaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program strategis; serta integrasi seluruh program pusat dan daerah dalam sistem perencanaan berbasis hukum untuk mencegah inefisiensi, duplikasi kegiatan, dan penyimpangan anggaran.

4. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan bahan pangan strategis. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan sistem logistik dan distribusi, serta pengendalian harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Kementan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara produksi, ketersediaan, dan keterjangkauan harga pangan untuk mendukung stabilitas inflasi nasional.
- b) Dalam menghadapi tantangan gejolak harga, Kementan juga memperkuat langkah intervensi pasar dan distribusi melalui program seperti fasilitasi pasokan antarwilayah, penyaluran bantuan pangan, serta kerja sama dengan BULOG dan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Kementan terus mendorong diversifikasi pangan lokal dan peningkatan produksi komoditas unggulan seperti padi, jagung, kedelai, cabai, dan bawang merah, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Penguatan kelembagaan petani, pengawasan rantai pasok, dan optimalisasi cadangan pangan di daerah menjadi bagian dari strategi pengendalian harga yang berkelanjutan.
- c) Secara keseluruhan, kebijakan Kementerian Pertanian diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kementan juga menekankan perlunya dukungan lintas sektor dan peningkatan sinergi antarinstansi dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan dan menekan potensi inflasi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengendalian inflasi pangan dapat berjalan lebih efektif, mendukung ketahanan ekonomi nasional, serta memastikan akses pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. KEMENTERIAN KOPERASI

- a) Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen ekonomi gotong royong dalam menjaga daya beli masyarakat desa dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. KDKMP berfungsi sebagai stabilisator harga, pengelola logistik dan distribusi desa, penyalur pembiayaan mikro, sekaligus pusat informasi harga dan produksi. Program ini juga berkontribusi menekan inflasi dengan memperpendek rantai pasok, meningkatkan harga di tingkat petani, serta mengurangi peran tengkulak. Hingga Oktober 2025, lebih dari 82 ribu KDKMP telah berbadan hukum dengan partisipasi lebih dari satu juta warga desa di seluruh Indonesia.
- b) Dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP yang melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini diimplementasikan melalui kolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana pembangunan, serta dukungan pendanaan dari DAU, DBH, dan Dana Desa. Melalui kebijakan ini, Kemenkop bersama kementerian terkait menargetkan terbentuknya sistem ekonomi desa yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan guna memperkuat rantai pasok pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pemerataan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

pertumbuhan ekonomi dari desa ke tingkat nasional.

6. KANTOR STAF PRESIDEN

- a) hasil pemantauan terhadap harga pangan strategis menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas berada pada kondisi waspada hingga tidak aman, dengan disparitas harga yang cukup tinggi antarwilayah. Komoditas seperti beras medium, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan gula pasir curah masih mencatat harga di atas batas acuan pemerintah, sementara komoditas minyak goreng Minyak Kita dan jagung tingkat peternak menunjukkan selisih harga yang signifikan dibandingkan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan. Kondisi ini menandakan masih adanya kendala distribusi, disparitas pasokan antarwilayah, serta biaya logistik yang tinggi, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.
- b) Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti daging ayam ras dan cabai rawit merah menunjukkan tren stabil dan berada dalam kisaran harga acuan yang ditetapkan. KSP menekankan perlunya langkah strategis untuk menekan disparitas harga antarwilayah melalui penguatan logistik pangan, efisiensi rantai pasok, dan percepatan penyaluran program stabilisasi pangan seperti SPHP beras dan jagung bagi peternak. Selain itu, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat guna memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan pangan nasional, sekaligus menjaga inflasi pangan agar tetap terkendali menjelang akhir tahun 2025.

7. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a) Program Pembangunan 3 Juta Rumah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog kepemilikan dan kelayakan rumah yang masih tinggi di Indonesia, dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui pembangunan rumah layak huni, pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesehatan keluarga, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan 185 subsektor industri yang terkait dengan sektor perumahan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat pemerataan pembangunan dari desa dan daerah tertinggal.
- b) Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program ini, khususnya melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) “0 Rupiah” bagi MBR. Hingga 24 Oktober 2025, sebanyak 32 provinsi dan 167 kabupaten/kota telah mengimplementasikan kebijakan tersebut, dengan total lebih dari 58 ribu unit rumah berfungsi hunian telah terealisasi. Kementerian PKP bersama Kemendagri terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar seluruh daerah dapat menerapkannya secara merata. Selain itu, pendataan pembangunan dan renovasi rumah di daerah terus diperbarui melalui sistem myPKP untuk memastikan akurasi data dan efektivitas kebijakan di lapangan.
- c) Kementerian PKP juga menyiapkan berbagai program lanjutan untuk tahun 2026, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun dan rumah khusus, serta bantuan pengembangan permukiman (PSU). Pemerintah daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran pembangunan rumah layak huni dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam APBD maupun APBDes. Selain itu, Kementerian PKP memperkuat layanan perlindungan konsumen melalui sistem pengaduan BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

program perumahan nasional. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan kebutuhan dasar papan yang berkelanjutan.

8. TENTERA NASIONAL INDONESIA

- a) TNI berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya di bidang swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, perumahan rakyat, dan hilirisasi energi. Melalui pembentukan 1.781 Brigade Pangan yang tersebar di 16 provinsi pada tahun 2024 dan ditambah enam provinsi baru pada tahun 2025, TNI turut membantu Kementerian Pertanian dalam memperluas realisasi tanam serta mendukung produksi pangan nasional. Hingga Oktober 2025, realisasi luas tanam nasional telah mencapai lebih dari 643 ribu hektare atau sekitar 62,89 persen dari target nasional, dengan fokus pada komoditas padi, cabai, dan tanaman perkebunan.
- b) Selain mendukung ketahanan pangan, TNI juga melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan prioritas seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Serbuan Teritorial, dan Operasi Teritorial yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu, TNI berperan dalam pengoperasian dan pembangunan Sentra Pangan dan Pangan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di lebih dari 11.500 lokasi di seluruh Indonesia, dengan target penambahan 6.000 dapur tambahan hingga akhir 2025.
- c) Sebagai bagian dari upaya mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi nasional, TNI juga memperluas satuan pertahanan pangan dan ketahanan wilayah melalui pembentukan 6 Kodam, 10 Brigif Teritorial, dan 55 Yonif Teritorial pada tahun 2025. Program ini bertujuan memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah yang belum memiliki satuan tetap. Dengan semangat kolaboratif, TNI mendorong seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi bersama TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pengentasan kemiskinan, serta stabilitas inflasi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) **Perkuat koordinasi lintas instansi** (Pemda, Bulog, BPS, Bapanas, dan aparat penegak hukum) untuk sinkronisasi kebijakan dan percepatan respon terhadap gejolak harga pangan.
- 2) **Tingkatkan efisiensi distribusi dan logistik pangan** melalui kerja sama antarwilayah, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah.
- 3) **Optimalkan cadangan pangan daerah (CPPD)** dan aktifkan **Gerakan Pangan Murah** secara rutin untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di pasar.
- 4) **Dorong produktivitas pertanian lokal** dengan memanfaatkan dukungan program swasembada pangan dari Kementan dan pendampingan TNI.
- 5) **Kembangkan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan** sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
- 6) **Percepat integrasi data harga dan stok pangan** ke dalam sistem pengendalian inflasi daerah berbasis digital untuk pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat.
- 7) **Tingkatkan edukasi dan pendampingan petani serta pelaku UMKM pangan**, guna menjaga kesinambungan produksi dan memperkuat rantai pasok lokal.
- 8) **Pastikan keberlanjutan program bantuan sosial dan pangan** seperti SPHP beras serta dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (27 Oktober 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula BPKAD yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru